



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PROSES PENERJEMAHAN KONTEN DIGITAL PADA WEBSITE BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TSANIA NISRINA NUR AZMI
2308411014

BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN
PROFESIONAL

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

DEPOK

2026



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul : Proses Penerjemahan Konten Digital pada Website Badan Koordinasi Penanaman Modal
- b. Penyusun
 - 1) Nama : Tsania Nisrina Nur Azmi
 - 2) NIM : 2308411014
- c. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- d. Jurusan : Administrasi Niaga
- e. Waktu Pelaksanaan : Senin, 2 Maret 2026 s.d. Jum'at, 2 Juni 2026
- f. Tempat Pelaksanaan
 - 1) Nama Perusahaan : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
 - 2) Alamat Perusahaan : Jl. Gatot Subroto No.44 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pembimbing PNJ

(Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL.)

NIP. 198109162023212018

Depok, 12 Juni 2026

Pembimbing Perusahaan



Tya

25031001

Mengesahkan,

Koordinator Program Studi BISPRO



(Gabrika Humolungo, S.Pd., M.A.)

NIP. 199103022023212042



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “Proses Penerjemahan Konten Digital pada *Website* Badan Koordinasi Penanaman Modal” dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. selaku Koordinator Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro)
2. Ibu Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, masukan, serta waktunya dalam proses penyusunan laporan ini.
3. Bapak Firdaus selaku Direktur, Bapak Franky selaku mentor, serta seluruh pegawai di lingkungan BKPM yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
4. Orang tua, keluarga, dan teman-teman penulis yang telah memberikan bantuan dukungan dan menemani penulis selama masa PKL.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif, khususnya dalam bidang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penerjemahan konten digital.

Depok, 12 Juni 2026

Penulis,

Tsania Nisrina Nur Azmi





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pekerjaan	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
1.4 Tujuan dan Manfaat	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teknik Penerjemahan	5
2.2 Pengertian Website	16
2.3 Pengertian Penerjemahan Konten Digital.....	17
BAB III.....	18
HASIL PELAKSANAAN PKL.....	18
3.1 Unit Kerja PKL.....	18
3.2 Kegiatan Selama Pelaksanaan PKL.....	20
3.3 Proses Penerjemahan Konten Digital.....	21
3.4 Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan PKL	25
BAB IV.....	27
PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN	31



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan serta membantu instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu media yang digunakan dalam penyebaran informasi adalah situs web resmi instansi. *Website* tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai media layanan informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan *website* sebagai media penyampaian informasi, instansi pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan informasi yang tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Kebutuhan ini menjadi semakin penting terutama ketika informasi yang disampaikan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat dalam negeri, tetapi juga bagi audiens internasional dengan latar belakang bahasa yang beragam.

Salah satu instansi pemerintah di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berperan dalam mengoordinasikan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, BKPM perlu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk investor global. Oleh karena itu, penyediaan informasi dalam bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penyebaran informasi mengenai peluang investasi di Indonesia.

Dalam hal ini, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa global sangat berperan penting untuk penyajian informasi yang berkualitas dan profesional.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informasi yang disampaikan tidak hanya perlu bersifat lengkap, tetapi juga harus dirumuskan dengan pilihan kata dan struktur bahasa yang tepat agar dapat dipahami secara efektif oleh pembaca global.

Namun demikian, proses penyediaan konten berbahasa Inggris pada *website* tidak hanya sekadar menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Proses penerjemahan perlu dilakukan secara tepat agar makna dari informasi yang disampaikan tetap terjaga serta dapat dipahami dengan baik oleh pembaca internasional. Ketidaktepatan dalam penerjemahan dapat menyebabkan perubahan makna, ketidaksesuaian istilah, maupun kesalahpahaman informasi, yang juga dapat memengaruhi kualitas komunikasi yang ingin disampaikan oleh instansi tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi penerjemahan yang memadai serta pemahaman yang baik terhadap konteks informasi yang disampaikan. Proses penerjemahan menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas informasi pada *website*, terutama pada penyajian konten dalam versi bahasa Inggris.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan magang dilaksanakan pada Unit Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan di BKPM dan fokus utamanya terdapat pada penerjemahan konten *website* resmi BKPM ke dalam versi bahasa Inggris. Kegiatan tersebut meliputi peninjauan konten *website* berbahasa Inggris, identifikasi kesesuaian penggunaan bahasa Inggris, serta penerjemahan beberapa bagian konten dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas informasi yang disajikan pada *website* resmi BKPM, khususnya pada versi bahasa Inggris.

1.2 Ruang Lingkup Pekerjaan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selama pelaksanaan kegiatan magang pada Unit Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan konten informasi pada *website* resmi BKPM, khususnya pada versi bahasa Inggris. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyediaan informasi yang jelas, akurat, serta mudah dipahami.

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan selama kegiatan magang, antara lain:

- a. melakukan analisis terhadap penggunaan bahasa Inggris pada *website*, termasuk ketepatan tata bahasa, pilihan kata pada istilah, serta kejelasan makna yang disampaikan.
- b. menerjemahkan beberapa bagian konten *website* dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dengan memperhatikan kesesuaian makna, struktur kalimat, serta penggunaan istilah yang tepat agar informasi tetap akurat dan mudah dipahami.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.3.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan 5 (lima) hari secara luring/Work From Office (WFO) dan berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari tanggal 2 Maret 2026 s.d. 2 Juni 2026

1.3.2 Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Unit Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.44 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktek Lapangan Kerja, antara lain:

- a. untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung khususnya yang berkaitan dengan penerjemahan konten digital;
- b. untuk menerapkan kemampuan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dalam penyajian informasi konten digital pada *website* resmi instansi;
- c. untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penerjemahan informasi secara tepat dan akurat.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Praktek Lapangan Kerja ini, antara lain:

- a. mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan profesional serta mengembangkan kemampuan dalam melakukan analisis dan menerjemahkan bahasa;
- b. memberikan kontribusi dalam membantu proses peninjauan serta penerjemahan konten *website* resmi BKPM, khususnya pada versi bahasa Inggris.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama proses penerjemahan konten *website* selama kegiatan PKL, diterapkan sebanyak enam teknik penerjemahan, yaitu kesepadanan lazim, penerjemah harfiah, transposisi, reduksi, amplifikasi, dan kompresi linguistik. Secara keseluruhan, teknik yang paling dominan adalah teknik kesepadanan lazim dan penerjemahan harfiah dengan persentase sekitar 25%. Menurut Molina dan Albir (2002), teknik kesepadanan lazim digunakan ketika suatu istilah telah memiliki padanan yang diakui dan digunakan secara umum di bahasa sasaran. Oleh karena itu, teknik tersebut banyak digunakan dalam proses terjemahan ini karena sebagian besar teks mengandung istilah-istilah khusus di bidang investasi dan perpajakan yang telah memiliki padanan resmi dalam bahasa Inggris, sehingga penggunaan istilah yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keakuratan informasi. Lalu, dikarenakan sebagian besar teks mengandung regulasi dan ketentuan hukum, teknik penerjemahan harfiah diterapkan demi menjaga ketepatan makna. Hal ini sesuai dengan teori Molina dan Albir (2002) yang menyatakan bahwa teknik penerjemahan harfiah diterapkan untuk menerjemahkan unsur bahasa sumber secara langsung ke dalam bahasa sasaran tanpa mengubah struktur dan makna utama pesan yang disampaikan. Sementara itu, teknik transposition diterapkan sekitar 20% untuk menyesuaikan struktur kalimat bahasa Indonesia agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa Inggris.

Teknik amplifikasi digunakan sekitar 15% dari keseluruhan terjemahan. Teknik ini diterapkan pada kalimat yang memerlukan tambahan penjelasan yang lebih detail agar informasi yang berkaitan dengan investasi dan perpajakan dapat dipahami dengan lebih jelas oleh audiens. Melalui penambahan ini, informasi yang sebelumnya masih tersirat dalam bahasa sumber menjadi lebih eksplisit tanpa mengubah makna aslinya. Selain itu, teknik kompresi linguistik digunakan sekitar 10%. Penggunaan teknik ini terlihat pada penerjemahan kalimat yang cukup

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

panjang sehingga teknik ini diterapkan agar informasi yang terdapat dalam bahasa sumber disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas pada bahasa sasaran tanpa menghilangkan makna dan informasi utama yang ingin disampaikan. Adapun teknik reduksi diterapkan pada sekitar 5% dengan menghilangkan kata atau frasa tertentu yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap informasi yang dijelaskan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penerjemahan konten investasi dan perpajakan selama kegiatan PKL lebih banyak mengutamakan ketepatan istilah dan keakuratan makna. Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan teknik kesepadanan lazim dan penerjemahan harfiah dalam menerjemahkan istilah-istilah serta regulasi yang berkaitan dengan investasi. Sementara itu, penggunaan teknik transposisi, amplifikasi, kompresi linguistik, dan reduksi membantu teks menghasilkan terjemahan yang lebih jelas dan ringkas. Dengan penerapan berbagai teknik tersebut, informasi yang disampaikan dalam bahasa sumber dapat diterjemahkan secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca global.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan PKL, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung upaya penerjemahan konten investasi di masa mendatang. Pertama, glosarium terkait istilah investasi, perpajakan, dan peraturan perlu diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi dan penggunaan istilah terbaru. Dengan demikian, konsistensi dan keakuratan terjemahan dapat lebih terjaga. Lalu, perlu adanya proses peninjauan ulang (*proofreading*) terhadap hasil terjemahan sebelum dipublikasikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa makna yang disampaikan dalam bahasa sasaran tetap sesuai dengan teks sumber, baik dari segi penggunaan istilah, tata bahasa, maupun konteks investasi yang dibahas. Dengan demikian, kualitas dan akurasi terjemahan dapat lebih terjaga sehingga informasi



yang disampaikan kepada audiens global menjadi lebih jelas serta menghindari kesalahpahaman informasi.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Molina, L., & Hurtado Albir, A. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta: Journal des traducteurs*, 47(4), 498–512. <https://doi.org/10.7202/008033ar>
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1982). *The theory and practice of translation*. E. J. Brill, p. 12.
- Catford, J. C. (1965). *A linguistic theory of translation*. Oxford University Press.
- Husna, J. (2019). Peran pustakawan sebagai kreator konten digital. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 3(2), 173–184.
- Irawan, I. N., Ansoriyah, S., & Rafli, Z. (2020). Terjemahan Beranotasi Teks Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) ke dalam Bahasa Inggris. *Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi Pendidikan (JARTIKA)*, 3(2), 368–381.
- Sinaga, S., & Jayantini, (2023). Prosedur Penerjemahan Istilah Ekonomi dalam Teks Online Bloomberg: Kajian Penerjemahan Beranotasi. *Lingua*, 20(2), 381–394. <https://doi.org/10.30957/lingua.v20i2.798>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). *Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/323562/permeninvesbkpm-no-2-tahun-2024>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Nomor : B-237.S/DL.03/B.2/A.1/2026
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Pelaksanaan Magang

Jakarta, 09 Juni 2026

Kepada Yth.
 Ketua Jurusan Administrasi Niaga
 Politeknik Negeri Jakarta
 di
 Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Tsania Nisrina Nur Azmi
 NIM : 2308411014
 Program Studi : Bahasa Inggris

telah selesai melaksanakan magang terhitung tanggal 2 Maret s.d. 2 Juni 2026 pada unit kerja Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Informasi dan Jaringan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun selama melaksanakan magang, yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan



Anna Nurbani

Tembusan:
 Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Sertifikat Praktik Kerja Lapangan



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Praktik Kerja Lapangan

- Peninjauan ulang *website* bkpm.go.id

BKPM.GO.ID

REVIEW

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Insentif

Insentif adalah dukungan kebijakan dari pemerintah yang berupa pembebasan, pengurangan, atau keringanan pajak, cukai, atau biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor atau wilayah tertentu.

English translation

Incentives are policy support measures provided by the government to attract investors, which may take the form of fiscal facility (such as tax reduction) or nonfiscal facility (such as simplified licensing procedures). The purpose is to encourage investment, business expansion, job creation, and economic growth in specific sectors or regions.

TRANSLATION NOT ADDED YET IN ENGLISH VERSION

Insentif

Insentif adalah dukungan kebijakan dari pemerintah yang berupa pembebasan, pengurangan, atau keringanan pajak, cukai, atau biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor atau wilayah tertentu.

Bahasa Indonesia version

Tax holiday

Current status

English version

English translation:
<https://docs.google.com/document/d/1xoQaDskNA12-cN8uBny7zxcso18hr8oCgB7lRMhEDw/edit?tab=t.0>

TYPO ON THE DAY & DATE

Cerbang Investasi Hilirisasi Indonesia

Kamis, 04 Desember 2025
(Bahasa Indonesia version)

Indonesia Downstream Investment Gateway

Thursday, 27 November 2025
(English version)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Proses terjemahan *website* bkpm.go.id (konten: Insentif)

Bahasa Sumber (Bahasa Indonesia)	Bahasa Sasaran (English)
INSENTIF	INCENTIVE
TAX HOLIDAY Tax holiday adalah pengurangan pajak penghasilan badan/Corporate Income Tax (CIT) sebesar 100% yang diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi pada sektor industri pionir dan memenuhi kriteria tertentu, dengan jangka waktu pembebasan tergantung pada besarnya investasi, dengan rincian sebagai berikut:	TAX HOLIDAY A tax holiday is a Corporate Income Tax (CIT) reduction up to 100% granted to companies who investing in pioneer industries sector and meet certain criteria, and exemption period depends on the investment value, with the following details:
• Tax holiday di IKN dan daerah mitra dalam rangka investasi di sektor keuangan di area Financial Center IKN dan investasi pendirian/pemindahan Kantor Pusat atau Headquarters dengan investasi minimal IDR 10 Miliar dengan jangka waktu pembebasan 10-30 tahun	• Tax holiday in Nusantara Capital City (IKN) and its partner regions in financial sector investment within the IKN Financial Center area and for the establishment or headquarters relocation with minimum investment of IDR 10 Billion and exemption period of 10 – 30 years
1. Tax holiday untuk industri pionir dengan investasi yang dimulai dari IDR 500 miliar (~US\$6,7 juta) dengan jangka waktu pembebasan 5-20 tahun; 2. Tax holiday untuk Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus/Special Economic Zones (SEZ) dengan investasi yang dimulai dari IDR 100 Miliar dengan jangka waktu pembebasan 10-20 tahun; 3. Tax holiday di IKN dan daerah mitra dalam rangka investasi di sektor keuangan di area Financial Center IKN dan investasi pendirian/pemindahan Kantor Pusat atau Headquarters dengan investasi minimal IDR 10 Miliar dengan jangka waktu pembebasan 10-30 tahun.	1. Tax holiday for the pioneer industry with the investment starting from IDR 500 Billion (~US\$6,7 million) and exemption period of 5 – 20 years; 2. Tax holiday for the Company located in Special Economic Zones (SEZ) with the investment starting from IDR 100 Billion and exemption period of 10 – 20 years; 3. Tax holiday in Nusantara Capital City (IKN) and its partner regions in financial sector investment within the IKN Financial Center area and for the establishment or headquarters relocation with minimum investment of IDR 10 Billion and exemption period of 10 – 30 years.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Pemberian masa pemanfaatan pengurangan pajak penghasilan diberikan antara 5-20 tahun berdasarkan besaran nilai investasi, semakin besar nilai investasi maka diberikan masa pemanfaatan yang lebih lama. Untuk pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100% dapat diberikan tambahan pengurangan pajak sebesar 50% selama 2 tahun di masa transisi. Sementara, untuk pengurangan pajak sebesar 50% atau disebut juga mini tax holiday diberikan untuk investasi minimal IDR 100 Miliar sampai dengan kurang dari IDR 500 Miliar di sektor industri pionir. Perusahaan dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% selama 5 tahun pertama, serta dapat diberikan tambahan pengurangan pajak sebesar 25% selama 2 tahun dalam masa transisi	The utilization period for income tax reduction ranges from 5 – 20 years depending on the investment value, the larger the investment value, the longer the benefit period granted. For 100% CIT reduction may be granted additional 50% tax reduction for 2 years during the transition period. Meanwhile, a 50% tax reduction or known as mini tax holiday is granted for investments ranging from a minimum of IDR 100 billion to less than IDR 500 billion in pioneer industry sectors. Companies may receive CIT reduction up to 50% for the first 5 years, followed by an additional 25% tax reduction for 2 years during the transition period.
Poin Perbaikan: • Tax holiday adalah pengurangan PPh Badan sesuai PMK 130/2020, bukan pembebasan. • Batas minimal investasi untuk skema tax holiday adalah IDR 100 miliar, bukan IDR 500 miliar. Tax holiday berlaku untuk industri pionir yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jangka waktu pembebasan pajak dapat bervariasi.	Additional Notes: • Tax holiday is Corporate Income Tax (CIT) reduction according to Minister of Financial Regulation No. 130 of 2020, not a full exemption. • The minimum investment limit for the tax holiday scheme is IDR 100 Billion, not IDR 500 Billion. Tax holidays apply to determined pioneer industries by the government, and exemption periods may vary.
TAX ALLOWANCE Tax allowance adalah fasilitas perpajakan yang memberikan pengurangan pajak penghasilan badan/ Corporate Income Tax (CIT) sebesar 30% dari jumlah investasi modal yang dilakukan selama 6 tahun (dengan pengurangan 5% per	TAX ALLOWANCE Tax allowance is a tax facility that provides CIT reduction up to 30% of the total capital investment for 6 years (with 5% reduction per year). This scheme is applicable for certain Business Sectors and/or certain regions



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

tahun). Skema ini tersedia untuk Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tax allowance juga mencakup beberapa fasilitas lainnya, seperti:	determined by the government. In addition, tax allowance includes several other benefits, such as:
• Percepatan penyusutan aset, yang memungkinkan perusahaan untuk menyusutkan aset lebih cepat daripada yang diizinkan dalam peraturan pajak biasa. • Pengurangan tarif pajak dividen, yang berlaku untuk perusahaan yang mendapatkan dividen dari dalam negeri maupun luar negeri. • Perpanjangan masa kerugian pajak yang dapat dibawa ke depan (<i>carry forward</i>) hingga maksimal 10 tahun.	• Accelerated depreciation of assets, allowing companies to depreciate assets faster than the standard tax regulation. • Reducing dividend tax rate, applied to the companies that receive dividends from domestic or foreign sources. • Extension of tax loss carry-forward periods for up to maximum 10 years.
Poin Perbaikan: Fasilitas tax allowance hanya berlaku untuk bidang usaha tertentu yang terdaftar dalam daftar bidang usaha yang ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019. Jumlah sektor yang terdaftar bisa berubah berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku.	Additional Notes: Tax allowance facilities applicable only to specific business sectors listed by the government under Government Regulation No. 78 of 2019. The number of eligible sectors may change depending on prevailing government policies.
SUPER TAX DEDUCTION Super Tax Deduction adalah fasilitas yang diberikan untuk mendorong investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Fasilitas ini memberikan pengurangan	SUPER TAX DEDUCTION Super Tax Deduction is an incentive aimed at encouraging investment in research and development (R&D), as well as human resource education and training. This facility provides CIT reductions under the following provisions:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

pajak penghasilan badan (CIT) dengan ketentuan sebagai berikut:	
• Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Litbang dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya untuk Litbang. • Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari total jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan, yang terdiri dari 100% pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan.	• Gross income deduction of 100% of R&D expenses, with an additional deduction of up to 200% of the total R&D expenditure. • Gross income deduction of up to 200% of total expenses incurred for activities, consisting of a 100% base deduction and an additional deduction of up to 100%.
Fasilitas ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih aktif dalam melakukan inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui R&D dan program pelatihan. Terdapat fasilitas pengurangan CIT yang diberikan untuk industri padat karya, yaitu berupa pengurangan Penghasilan Neto sebesar 60 persen dari total nilai investasi selama 6 tahun, yang dibebankan 10 persen per tahun di sektor industri padat karya.	This facility is intended to encourage companies to actively engage in innovation and improve human resource quality through R&D and training programs. There is a CIT reduction facility for labour-intensive industries, in the form of a 60% net income reduction of total investment value for 6 years, applied at 10% per year in the labour-intensive industries sector.
Poin Perbaikan: • Super tax deduction memberikan pengurangan CIT yang lebih tinggi pada kegiatan R&D dan pendidikan dibandingkan dengan skema lain.	Additional Notes: • Super tax deduction provides higher CIT reductions for R&D activity and education compared to the other scheme.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Untuk industri padat karya, pengurangan CIT yang diberikan lebih besar (60%) dibandingkan dengan sektor lainnya.	Labour-intensive industries receive a higher (60%) of CIT reduction compared to other sectors.
FASILITAS BEA MASUK Indonesia memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan barang atau bahan baku yang diimpor untuk digunakan dalam proses produksi, dengan periode pembebasan hingga 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan range nilai rencana investasi. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi di sektor industri dalam negeri. Selain itu diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Selain itu di Kawasan Berikat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk (bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan), tidak adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan ditiadakannya pungutan terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan di KEK diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang modal pada masa pembangunan, dan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk mesin, bahan baku dan bahan penolong pada masa produksi. Indonesia juga merupakan bagian dari Generalized System of Preferences (GSP) yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang memberikan manfaat tarif impor yang lebih rendah untuk produk-produk Indonesia yang memasuki pasar AS. Namun, manfaat ini berlaku untuk sejumlah produk tertentu, dengan cakupan lebih dari 3.500 jenis produk.	IMPORT DUTY FACILITIES Indonesia provides the imported duty exemptions for machines and goods or raw materials used in production processes with the exemption period is up to 2 years and may be extended for another 2 years, and further extend depends on the planned investment value. This facility aims to support increased production capacity and efficiency in the domestic industrial sector. Moreover, exemptions from Value Added Tax (VAT) are granted for the import and/or delivery of certain strategic taxable goods. Additionally, in Bonded Zones, facilities include suspension of import duties (for raw materials, auxiliary materials, machinery, and equipment), exemption from VAT, exemption from Luxury Goods Sales Tax (LGST). In Special Economic Zones (SEZs), facilities include import duty exemptions and exemption from Import-Related Taxes (PDRI) for capital goods during the construction phase, suspension of import duties and exemption from PDRI for machinery, raw materials, and auxiliary materials during the production phase. Indonesia is also a part of the Generalized System of Preferences (GSP) applied by the United States, which provides lower import tariffs for Indonesian products entering the U.S. market. However, this benefit applies only to certain products, covering more than 3.500 product categories.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

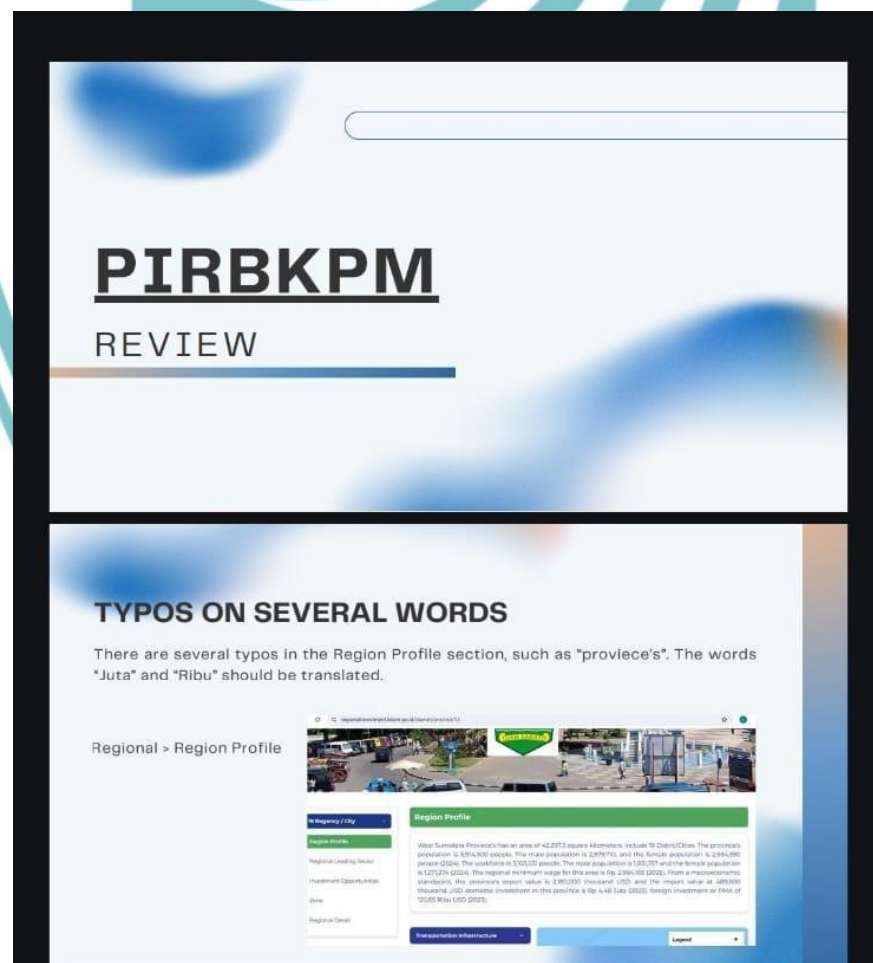
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Poin Perbaikan: Periode pembebasan bea masuk untuk barang impor yang digunakan dalam produksi adalah 2 tahun, bukan 3 tahun. Fasilitas PPN di FTZ dan zona berikat serta GSP bukan jenis fasilitas yang diberikan oleh Keminveshil/BKPM kepada pelaku usaha.	Additional Notes : The import duty exemption period for production-related goods is 2 years, not 3 years. VAT facilities in Free Trade Zones (FTZ), bonded zones, and GSP are not incentives provided from the Ministry of Investment and Downstream Industry/BKPM to the business actors.
--	--

- Peninjauan ulang & proses terjemahan *website* PIR BKPM





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Regional > Aceh > Regional Leading Sector > Construction

Regional Leading Sector

TRANSPORTATION **CONSTRUCTION** AGRICULTURE FISHERY TRADE

Description

Pentingnya sektor konstruksi dalam pembangunan telah diakui secara luas tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Di Aceh, sektor konstruksi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Potential Market

Program pembangunan seperti peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya akan membuka peluang bagi sektor untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan Aceh secara keseluruhan.

Sub Sector

ENGLISH TRANSLATION

Regional > Aceh > Construction

Description

The importance of the construction sector in development has been widely acknowledged, not only from an economic perspective but also in social and cultural dimensions. In Aceh, the construction sector contributes significantly to GRDP (Gross Regional Domestic Product), although its contribution has decreased in recent years.

Potential Market

Development initiatives, including improvements in roads, bridges, and other public infrastructure, are expected to create broader opportunities for the sector and positively impact the overall economy of Aceh.

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > Agriculture

16 Regency / City

Region Profile **Regional Leading Sector** Potential Market Investment Opportunities Zone Regional Detail

Regional Leading Sector

AGRICULTURE FISHERY TOURISM ENERGY TRANSPORTATION

Description

Perekonomian Provinsi Lampung lima tahun terakhir (2019-2023), didominasi kategori pertanian. Di Provinsi Lampung, sektor pertanian juga merupakan sektor yang menyumbang tenaga kerja terbesar. Berdasarkan data hasil Survei Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian sebesar 42,52 persen.

Potential Market

Produk hasil pertanian tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk mentah tetapi juga diolah menjadi berbagai barang yang siap pakai maupun barang setengah jadi. Oleh karena itu, sektor pertanian juga berperan dalam proses pembangunan industri. Hal ini dikarenakan sebagian besar input sektor industri berasal dari output sektor pertanian. Ketika proses produksi sektor industri meningkat, maka secara tidak langsung dapat menyuguhkan banyak output sektor pertanian juga meningkat. Hal tersebut membuka adanya hubungan kemitraan antara sektor pertanian yang menyediakan dampak positif secara langsung, dan lapangan kerja dalam perekonomian yang disebut dengan multiplier effect.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > Agriculture

ENGLISH TRANSLATION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > Agriculture

Description

The economy of Lampung has been dominated by the agricultural sector over the past five years (2019 – 2023). Agriculture is also the largest employer in Lampung. Based on data from the August 2023 Sakernas (National Labor Force Survey), 42.32 percent of the working population is employed in agriculture sector.

Potential Market

Agricultural products are not only consumed in their raw form but are also processed into various finished and semi-finished goods. Therefore, the agricultural sector plays an important role in the process of industrial development. This is because a significant portion of industrial inputs originates from agricultural outputs. When industrial production increases, it indirectly indicates a rise in agricultural output. This interconnection between economic sectors creates impacts on output, income, and employment within the economy, commonly referred to as the multiplier effect.

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > fishery



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > Tourist

Regional Leading Sector

AGRICULTURE FISHERY **TOURIST** ENERGY TRANSPORTATION

Description

Lampung memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata antara lain alam yang indah dan hawa sejuk, dikelilingi oleh kahjauan bukit dan gunung yang banyak ditumbuhi aneka ragam bunga dan pohon demikian pula adat istiadatnya. Dengan kondisi demikian maka Lampung bisa dijadikan mata rantai tujuan wisata. Lampung juga memiliki berbagai produk lokal yang unggul, seperti kopi robusta, pisang, dan gula, yang memiliki nilai ekonomi tinggi, berbagai kuliner khas dan potensi wisata religi dengan tempat-tempat ibadah bersejarah.

Potential Market

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Provinsi Lampung pada Januari 2025 mencapai 2.222.813 perjalanan, tumbuh 37,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan tumbuh 24,66 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Januari 2025, Kota Bandar Lampung menjadi Kabupaten tujuan perjalanan terbanyak dengan 480.642 perjalanan (21,62 persen dari total Provinsi Lampung), dan Kabupaten Pesisir Barat dengan 45.756 perjalanan (2,06 persen dari total Provinsi Lampung).

ENGLISH TRANSLATION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > Tourist

Description

Lampung has natural and cultural potential that can be developed as tourist attractions, including beautiful landscapes and a cool climate, surrounded by lush green hills and mountains rich in diverse flora, as well as distinctive local traditions. With these conditions, Lampung has strong potential to become an important destination within the tourism chain. Lampung also offers a range of high-value local products, such as robusta coffee, bananas, and sugar, along with a variety of traditional cuisines and religious tourism potential, supported by historic places of worship.

Potential Market

In January 2025, the number of domestic tourist trips (wisnus) in Lampung Province reached 2,222,813 trips, growing by 37.34 percent compared to the same period in the previous year and by 24.66 percent compared to the previous month. In the same period, Bandar Lampung recorded the highest number of visits, with 480,642 trips (21.62 percent of the provincial total), while Kabupaten Pesisir Barat with 45,756 trips (2.06 percent of the total).

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > Energy

Regional Leading Sector

AGRICULTURE FISHERY TOURIST **ENERGY** TRANSPORTATION

Description

Di tahun 2024 rata-rata pelanggan listrik per bulan mencapai 2.688.489 pelanggan. Dari 21 rayon yang ada, PT PLN mampu melayani kebutuhan listrik seluruh wilayah di Provinsi Lampung dengan nilai produksi listrik sebesar 6.001.47.920 kWh dengan nilai penjualan sebesar Rp6.299.613.773.102.

Potential Market

Kebutuhan Listrik di Provinsi Lampung sebagian besar di penuhi oleh PT PLN (Persero). Jumlah Pelanggan listrik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

ENGLISH TRANSLATION

Regional > Lampung > Regional Leading Sector > Energy

Description

In 2024, the average number of monthly electricity customers reached 2,688,489 customers. Through its 21 service units, PT PLN (Persero) was able to meet the electricity demand across all areas of Lampung Province, with total electricity production reaching 6,001,147,920 kWh and sales valued at IDR 6,299,613,173,102.

Potential Market

Most of the electricity demand in Lampung Province is supplied by PT PLN (Persero). The number of electricity customers has continued to increase from year to year.

THE TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED YET IN ENGLISH VERSION

Regional > Central Kalimantan > Regional Leading Sector > Tourist

Regional Leading Sector

TOURISM MINING AGRICULTURE FISHERY

Description

Sektor pariwisata diharapkan menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan dan sangat potensial dijadikan sebagai titik poros penghubung antara provinsi provinsi lain di Pulau Kalimantan dan juga berbatasan langsung dengan laut Jawa, Danau Tawil Wulak, Danau Surung, Matan Andau, Bukit Cinta, Batu Banama, Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Penangkaran Rusa.

Potential Market

Lokasi dan proyek yang akan dibangun memiliki kesesuaian dengan hutan tanaman, Center for International Forestry Research (CIFOR), kawasan wisata alam ecotourism area, kawasan pekar pengendalian rusa, fasilitas umum dan kawasan makam hewan. Potensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di sektor kawasan dan pertumbuhan ekonomi lokal. M sudah didukung infrastruktur dasar seperti air bersih, energi listrik, jaringan telekomunikasi, dan transportasi. endasat pengurangan pajak lokal sebesar 100%, bebas bea masuk, bebas PPh & tidak ada pembatasan ekspor-impor untuk komoditas barang.

ENGLISH TRANSLATION

Regional > Central Kalimantan > Regional Leading Sector > Tourist

Description

The tourism sector is expected to become a key industry that the government can rely on in the future as a primary pillar of national economic development. Central Kalimantan Province where located in the central part of Kalimantan Island, holds strong potential to serve as a strategic hub connecting other provinces across the island and is directly adjacent to the Java Sea. Key tourist attractions include Danau Surung, Matan Andau, Bukit Cinta, Batu Banama, Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, and Penangkaran Rusa.

Potential Market

The proposed project location is aligned with designated land uses, including plantation forests, Center for International Forestry Research (CIFOR) areas, ecotourism zones, deer management centers, public facilities, and animal cemetery areas. The project is expected to increase employment opportunities in surrounding areas and support local economic growth. It is also supported by basic infrastructure such as water supply, electricity, telecommunications networks, and transportation. Additionally, the project offers investment incentives, including the reduction up to 100% in local taxes, exemption from import duties, VAT exemption, and no restrictions on export-import activities for goods movement.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Proses terjemahan *website* oss.go.id (Konten: Business Facility > Tax Holiday)

Teks Sumber (ID)	Teks Sasaran (EN)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.	Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 130/PMK.010/2020 concerning Corporate Income Tax Reduction Facility and Investment Coordinating Board Regulation Number 7 of 2020 concerning the Details of Business Sectors and Types of Production of Pioneer Industries as well as the Procedures for Granting Corporate Income Tax Reduction Facilities, corporate taxpayers that make new investments in Pioneer Industries may obtain a reduction of Corporate Income Tax on income received or earned from the Main Business Activities conducted.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Proses terjemahan *website oss.go.id* (Konten: Business Facility > Tax Allowance)

Teks Sumber (ID)	Teks Sasaran (EN)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2020 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2020, Pelaku Usaha yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. Bidang Usaha pada sektor Industri juga merujuk Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019.	Based on Government Regulation Number 78 of 2019 and the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 11/PMK.010/2020 in conjunction with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 96/PMK.010/2020, Business Actors that make Investments in Main Business Activities as listed in the Appendix to Government Regulation Number 78 of 2019 and meet certain criteria and requirements may be granted Income Tax facilities. Business sectors in the Industrial sector also refer to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 47 of 2019.

- Proses terjemahan *website oss.go.id* (Konten: Business Facility > Investment Allowance)

Teks Sumber (ID)	Teks Sasaran (EN)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya, Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu tertentu.	Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 16/PMK.010/2020 concerning the Provision of Net Income Reduction Facilities for New Investment or Business Expansion in Certain Business Sectors Classified as Labor-Intensive Industries, taxpayers who make investments in labor-intensive industries may be granted Income Tax facility in the form of a reduction of net income up to a certain level of the investment amount for a specified period of time.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Proses terjemahan *website oss.go.id* (Konten: Business Facility > Vocational)

Teks Sumber (ID)	Teks Sasaran (EN)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan Dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran yang meliputi: 1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; 2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran dengan ketentuan: 1. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu; 2. memiliki Perjanjian Kerja Sama; 3. tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan 4. telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.	Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 128/PMK.010/2019 concerning the Provision of Gross Income Reduction for the Implementation of Work Practice, Apprenticeship, and/or Learning Activities in the Context of Competency-Based Human Resource Development, taxpayers may be granted a gross income reduction of up to 200% (two hundred percent) of the total expenses incurred for work practice, apprenticeship, and/or learning activities, which include: 1. Gross income reduction of 100% from the total expenses incurred for work practice, apprenticeship, and/or learning activities 2. Additional gross income reduction of up to 100% from the total expenses incurred for work practice, apprenticeship, and/or learning activities with the following conditions: 1. has conducted work experience, apprenticeship, and/or learning activities in the context of human resource development and training based on the certain competencies; 2. has a Cooperation Agreement; 3. is not in a state of fiscal loss in the Tax Year of additional gross income deduction utilization; and 4. has submitted a Fiscal Certificate. Specific competencies are the competencies that taught at: 1. vocational senior high schools and/or vocational Islamic senior high schools, for students, educators, and/or education personnel; 2. higher education diploma programs



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Kompetensi tertentu merupakan kompetensi yang diajarkan pada: 1. sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan; 2. perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; dan/atau 3. balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latihan, <u>instrukturi</u> dan/ atau tenaga kepelatihan.	in vocational education, for students, educators, and/or education personnel; and/or 3. job training centers, for individual trainees, instructors, and/or training personnel.
---	---

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Glosarium istilah terkait investasi

Bahasa Indonesia	English	Definition
A		
Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)	SEZ (Special Economic Zone) Administrator	The unit responsible for handling business licensing, other permits, services, and monitoring within the SEZ.
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)	EIA (Environmental Impact Assessment)	A study of the significant impacts of a planned business and/or activity on the environment, which is required for the decision-making process regarding the implementation of the business and/or activity.
ASN (Aparatur Sipil Negara)	State Civil Apparatus	Individuals employed by the government and appointed to carry out public administrative duties.
B		
Badan Pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas)	Free Trade Zone and Free Port Area (KPBPB) Authority	An area located within the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia that is separate from the customs areas and is therefore exempt from import duties, value-added tax, sales tax on luxury goods, and excise taxes.
BAP (Berita Acara Pemeriksaan)	Police Investigation Report	The result of a field inspection conducted regarding the implementation of investment activities.
BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)	Investment Coordinating Board	Non-Ministerial Government Institutions that carry out governmental duties in the field of investment coordination.
BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal)	Investment Business Sector	A classification of business activities in Indonesia to investment purpose.
D		
DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	One-stop Integrated Service and Investment Agency	Regional government agency of the provincial government or the regency/municipal government responsible for administering local government affairs in the field of investment.
F		

(lanjutan)

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk	Import Duty Exemption Facility	A government incentive that allows businesses to import certain goods without paying import duties.
Fasilitas Penanaman Modal	Investment Facilities	All forms of fiscal and non-fiscal incentives, as well as service facilitation provided for investment activities, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
H		
Hak Akses	Access Rights	A right granted by the government of the Republic of Indonesia through the OSS Agency in the form of an access code.
Hak PVP (Perlindungan Varietas Tanaman)	Plant Variety Protection (PVP) rights	Exclusive rights granted by the state to plant breeders or rights holders to use their developed plant varieties or allow others to use them for a certain period of time.
I		
IKN (Ibu Kota Nusantara)	Nusantara Capital City	A special regional administrative unit at the provincial level, the area of which serves as the seat of the national capital.
Interoperabilitas Sistem	System Interoperability	Interconnection between OSS System with the system of related ministries/agencies within a single Business Licensing ecosystem.
J		
Jejak Audit	Audit Trail	A trail record of all stages of processes, whether within a single agency or institution or interagency, to ensure the legal validity of process outcomes, as well as to document all events and accountability for any deviations for which the licensing service provider is responsible.
K		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

Kantor Perwakilan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)	Representative office of Foreign Construction Service Business Entities	A business entity established under the Laws and domiciled in a foreign country, which maintains a representative office in Indonesia, and is equivalent to a limited liability company engaged in the construction services sector.
Kawasan Industri	Industry Zone	An area designated for the concentration of industrial activities, equipped with supporting facilities and infrastructure, developed and managed by an industrial estate company.
Kawasan Perdagangan Bebas	FTA (Free Trade Zone)	A designated area within a country where goods can be imported, processed, and exported without the interference of customs duties and taxes.
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)	Indonesia Standard Classification of Business Fields	Standardized coding system developed by Central Statistics Agency (BPS) to classify economic activities in Indonesia based on the goods or services they produce.
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)	SEZs (Special Economic Zone)	A designated area of a country set aside for economic activities.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi	Ministry of Investment and Downstream Industry	The ministry is responsible for administering governmental affairs in the field of investment and the sub-sector of downstreaming, which falls within the scope of governmental affairs in the field of investment.
KK (Kontrak Karya)	Contract of Work (CoW)	An agreement between the government and an Indonesian legal entity to conduct the mineral mining business activities.
KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	Confirmation of the Suitability of Spatial Utilization Activities	Document that confirms the suitability of space utilization activities plan with the detailed spatial plan (RDTR).
KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	Suitability of Space Utilization Activities	Suitability between the space utilization activities plan and the spatial plan.

(lanjutan)

KKPRD (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat)	Suitability of Land Space Utilization Activities	Suitability between the space utilization activities plan and the spatial plan that has been determined by the government, serving as a fundamental requirement for obtaining risk-based business licensing on land.
KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	Suitability of Marine Space Utilization Activities	Suitability between the space utilization activities plan and the spatial plan that the business location is in the sea.
KKRL (Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut)	Confirmation of the Suitability of Marine Space	Document that confirms the alignment between marine space utilization activities plan with the Spatial Plan (RTR) and/or Zoning Plan (RZ).
KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)	Foreign Company Representative Office	An office headed by one (1) or more individuals of foreign nationals or Indonesian citizens appointed by foreign company or a consortium of foreign companies abroad as its representative in Indonesia.
KP3A (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)	Representative Office of Foreign Trade Company	An office headed by an individual, either an Indonesian citizen or a foreign national, appointed by a foreign company or a consortium of foreign companies abroad as its representative in Indonesia.
KP3A Bidang PMSE (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	Foreign Trade Company Representative Office (KP3A) Trade Through Electronic Systems (PMSE)	an office headed by one (1) or more individuals, either Indonesian citizens or foreign nationals, appointed by a foreign electronic commerce operator to serve as its representative in Indonesia.
L		
Lembaga OSS (One Single Submission) – Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	OSS Institutions	The institutions responsible for administering governmental affairs in the field of investment and the sub-sector of downstreaming, as well as carrying out governmental duties in the field of investment coordination.
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Investment Activity Report	A report on the progress of investment realization and the issues faced by business

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(lanjutan)

		actors, which must be prepared and submitted periodically.
N		
NIB (Nomor Induk Berusaha)	Business Identification Number	Registration proof for business owners to conduct their business activity and as an identity for business owners in business activities implementation.
(NIK) Nomor Induk Kependudukan	Resident Identification Number	Unique resident ID number or distinctive, singular, and attached to someone who registered as an Indonesian resident.
O		
OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara)	Nusantara Capital City Authority	The body responsible for carrying out the preparation, development, and relocation of the National Capital City, as well as administering the special regional government of the Nusantara Capital City.
P		
Pajak Penghasilan Badan	CIT (Corporate Income Tax)	A tax imposed on corporations based on the income they receive or earn within a fiscal year.
PB (Perizinan Berusaha)	Business Licensing	The legal authorization granted to business actors to commence and carry out their business and/or activities.
PBBR (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)	Risk-Based Business Licensing	A business licensing that applies a risk-based approach, obtained from the results of a risk analysis of each business activity.
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Building Approval	An approval granted to building owners to construct, modify, expand, reduce, or maintain buildings in accordance with applicable technical standards.
PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	Business Licensing to Support Business Activities	The legality granted to business actors to support their business activities.
PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)	Imported Tax	The tax incentives in the form of non-collected import value-added tax and exemption from the collection

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(lanjutan)

		of income tax in the context of import activities.
Pelaku Usaha	Business Owner	An individual or business entity that conducts business and/or activities in a specific field.
Pemerintah Pusat	Central Government	The President of the Republic of Indonesia who holds the power of the government of the Republic of Indonesia, assisted by the Vice President and ministers.
Pemerintah Daerah	Regional Government	The regional head as the element of regional governance that leads the implementation of governmental affairs under the authority of the autonomous region.
Penanaman Modal	Investment	All forms of capital investment activities, whether undertaken by domestic investors or foreign investors, to conduct business within the territory of the Republic of Indonesia.
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	Electronic Certification Provider	Legal entity that has a function as a trusted party who issues and audits the electronic certification.
PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)	Coal Contract of Work (CCoW)	An agreement between the Government and an Indonesian legal entity to carry out coal mining business activities.
PL (Persetujuan Lingkungan)	Environmental Approvals	The Environmental Feasibility Decision or an Environmental Management Commitment Statement that has been approved by the Central Government or Regional Government.
PMA (Penanaman Modal Asing)	Foreign Direct Investment (FDI)	Investment activities carried out within the territory of the Republic of Indonesia by foreign investors, whether fully foreign-owned or in partnership with domestic investors.
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	Domestic Investment	Investment activities carried out within the territory of the Republic of Indonesia by

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

		domestic investors using domestic capital.
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Non-Tax State Revenue	Levies paid by individuals or entities who obtain direct or indirect benefits from services, or from resources utilization and the rights granted by the State, in accordance with laws and regulations, which constitute central government revenue other than tax revenue and grants, and are managed within the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) mechanism.
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	Approval of the Suitability of Space Utilization Activities	Document that confirms the alignment between the Spatial Utilization activities plan and the Spatial Plan (RTR), other than the Detailed Spatial Plan (RDTR).
PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	Operator of Trade Through Electronic System	A business actor that provides electronic communication facilities used for conducting trade transactions.
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	VAT (Value Added Tax)	Taxes imposed on domestic consumption of goods and services
PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)	LGST (Luxury Goods Sales Tax)	A tax imposed on luxury goods to manufacturers to produce or import goods in their business or work activities. PPnBM is only imposed once when the goods are delivered to the producer.
PPKP (Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan)	Fishing Vessel Procurement Approval	An approval letter granted to a holder of a Fisheries Business License (SIUP) to build or modify a fishing vessel.
PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan)	Forest Area Use Approval	An approval for the use of a portion of a Forest Area for development purposes outside of forestry activities without changing the function and designation of the Forest Area.
PSP (Penyelenggara Sarana Perantara)	Intermediary Services	Domestic Business Actor or Foreign Business Actor that provides electronic communication facilities, other than a telecommunications



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

		operator, and functions solely as an intermediary in electronic communication between the sender and the recipient.
PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	One-stop Integrated Service	An integrated service delivered through a single process, from the application stage to the completion of the service, provided through a single entry point.
PTSP Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Central One-Stop Integrated Service at the Ministry of Investment and Downstreaming/BKPM	The investment services under the Government authority that are delivered in an integrated manner within a single unified process, from the application stage through to the completion of service products, through a one-stop service at the Ministry of Investment and Downstreaming/BKPM.
R		
RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)	Detailed Spatial Plan	Detailed spatial plan for a regency or city, complemented by zoning regulations.
RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Environmental Management Plan	Efforts to handle the environmental impact as a result of the Business Plan and/or Activity
RKL Rinci	Detailed RKL	A detailed plan for managing the environmental impacts of a proposed business and/or activity.
RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)	Environmental Monitoring Plan	Efforts to monitor environmental components affected by a proposed business and/or activity.
RPL Rinci	Detailed RPL	Efforts to monitor environmental components affected by a proposed business and/or activity in the areas that already have EIA.
RTR (Rencana Tata Ruang)	Spatial Plan	The result of spatial planning
RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	Regional Spatial Plan	The result of a spatial plan for a specific area, which represents a unified geographical region along with



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

		its related elements, with boundaries and systems defined based on administrative aspects.
RZ (Rencana Zonasi)	Zoning plan	A plan that regulates the direction of use of marine resources, spatial structure and spatial patterns in a particular planning area.
RZ KAW (Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah)	Inter-Regional Zoning Plan	A plan prepared to determine the direction of the Utilization of Marine Space in Inter-Regional Areas.
RZ KSNT (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu)	Zoning Plan for Certain National Strategic Areas	A plan prepared to determine the direction of Marine Space Utilization in certain national strategic areas.
RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)	Coastal and Small Islands Zoning Plan	A plan that determines the direction of resource use for each planning unit in coastal and small island areas.
S		
Sertifikat Standar	Standard Certificate	A statement and/or proof of fulfilment of standards for the implementation of business activities.
SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung)	Function Worthiness Certificate	Certificate issued by the local government confirming that a building meets functional feasibility requirements and is eligible for use.
SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Building Management Information System	An integrated digital platform designed to facilitate the issuance of building approvals, operational permits, and related certifications.
Sistem OSS (<i>One Single Submission</i>) – Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	OSS (One Single Submission) System – Electronically Integrated Business Licensing System	An integrated electronic system managed and administered by the OSS Institution for the implementation of Risk-Based Business Licensing (PBRR).
SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)	Fisheries Business License	Written permission that must be held to carry out a fishing business using the production facilities listed in the permit.
SIUP3A (Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)	Representative Business License of Foreign Trade Company	A license to carry out business activities as a representative office of a foreign trading company.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

SKKP (Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan)	Fishing Vessel Seaworthiness Certificate	A document certifying that a fishing vessel meets the requirements of seaworthiness, catch worthiness, and stowage.
SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)	Environmental Management Statement Letter	A document that must be owned by every activity or business actor that can have a potential impact on the environment.
SPS (Surat Perintah Setor)	Payment Order	A Letter of Order to pay the nominal fee for the requested land services. SPS also functions as a Temporary Receipt
Sumber Radiasi Pengion	Ionizing Radiation Source	Anything that causes exposure to ionizing radiation, either through the emission of radiation or the release of radioactive substances.
T		
Tanda Tangan Elektronik	Electronic Signature	A signature that consists of electronic information attached, associated, or related to other electronic information used as a means of verification and authentication.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Environmental Feasibility Test Team	A team established by the Environmental Feasibility Assessment Agency located at the central and regional levels to conduct feasibility assessments.
U		
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises)	Micro Enterprise is a business owned by an individual and/or an individual business entity that meets the criteria of a Micro Enterprise. Small Enterprise is an independent economic business carried out by an individual or a business entity that is not a subsidiary or branch of a company that is owned, controlled, or directly or indirectly part of a Medium or Large Enterprise.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

		Medium Enterprise is an independent economic business carried out by an individual or a business entity that is not a subsidiary or branch of a company that is owned, controlled, or directly or indirectly part of a Small or Large Enterprise, based on its net assets or annual sales revenue.
UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan)	Environmental Management and Monitoring Efforts	The management and monitoring of business and/or activities that do not have significant impacts on the environment, which are required for the decision-making process regarding the implementation of such business and/or activities.

Lampiran 4. Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Logbook bimbingan dosen pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon
(021)7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM BIMBINGAN PKL* (DOSEN PEMBIMBING PNJ)

JUDUL PKL: PROSES PENERJEMAHAN KONTEN DIGITAL PADA WEBSITE BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1	Jum'at, 13 Maret 2026	Draft Bab I	
2	Rabu, 15 April 2026	Revisi Bab I & Draft Bab II	
3	Senin, 1 Juni 2026	Revisi Bab II & Draft Bab III	
4	Kamis, 11 Juni 2026	Revisi Bab III & Draft Bab IV	
5			
6			
7			

Depok, 11 Juni 2026

Pembimbing,

(Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL.)

NIP. 198109162023212018



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Logbook bimbingan mentor industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon
(021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LOGBOOK BIMBINGAN PKL

(Pembimbing Industri)

1. Nama Perusahaan/Industri : Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM
2. Alamat : Jl. Gatot Subroto No.44 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Judul PKL : Proses Penerjemahan Konten Digital pada Website Bada Koordinasi Penanaman Modal
4. Nama pembimbing industri : Franky Mangihut Tua

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1	Senin, 2 Maret 2026 - Jum'at, 6 Maret 2026	Review website BKPM (bkpm.go.id)	
2	Senin, 9 Maret 2026 - Jum'at, 13 Maret 2026	Menerjemahkan konten website BKPM (bkpm.go.id)	
3	Senin, 16 Maret 2026 - Jum'at, 27 Maret 2026	Membuat glosarium terminologi terkait investasi	
4	Selasa, 31 Maret 2026 - Kamis, 2 April 2026	Review website PIRBKPM (regionalinvestment.bkpm.go.id)	
5	Senin, 6 April 2026 - Selasa, 14 April 2026	Menerjemahkan konten website PIRBKPM (regionalinvestment.bkpm.go.id)	
6	Rabu, 22 April 2026 - Jum'at, 24 April 2026	Review website OSS (oss.go.id)	
7	Senin, 27 April 2026 -	Menerjemahkan konten website	
	Kamis, 7 Mei 2026	OSS (oss.go.id)	
8	Senin, 11 Mei 2026 - Selasa, 26 Mei 2026	Membuat PowerPoint final presentation terkait hasil kegiatan selama magang	
9	Selasa, 2 Juni 2026	Mempresentasikan hasil review website	

Jakarta, 06 Juni 2026

Pembimbing Perusahaan,

Franky Mangihut Tua
NIP. 196601032015031001
REPUBLIC INDONESIA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Hasil evaluasi PKL



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

HASIL EVALUASI

Nama Mahasiswa : Tsania Nierina Nur Azmi
 NIM : 2308411014
 Judul PKL : Proses Penerjemahan Konten Digital pada Website Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Praktik Kerja Lapangan

No	Komponen Penilaian	Range Nilai	Nilai yang Dicapai
1	Kemampuan Berbahasa Secara Lisan	10-20	18
2	Kemampuan Berbahasa Secara Tulisan	10-20	18
3	Kerja Sama	10-20	20
4	Kedisiplinan	10-20	20
5	Etika	10-20	20
Total Nilai (A)			96

Jakarta, 12 Juni 2026

Pembimbing Perusahaan/Industri,

(Franky Mangihut Tua)

NIK. 198801092015031001

Saran Pembimbing perusahaan/industri terhadap mahasiswa PKL

1. Tidak ada

Catatan : Nilai disampaikan ke panitia PKL Politeknik Negeri Jakarta dalam amplop tertutup.